

KUNKER KE LEBAK BANTEN

Kekuatan Budaya, Kulonprogo Bisa Adopsi Spiritnya

WATES (KR)-Pariwisata di Lebak Banten kekuatannya pada tradisi dan budaya. Sedang di Kulonprogo adalah mengembangkan desa-desa wisata dengan tema beraneka ragam. Ke depan di Kulonprogo ada beberapa kalurahan/desa wisata bisa mengadopsi spirit yang ada di Banten.

"Tetapi tidak semua. Artinya, tidak semua desa wisata harus menginduk/ mengadopsi apa yang ada di Banten. Ada beberapa yang kita rekomendasikan untuk mencontoh Lebak Banten. Seperti di Jatimulyo dan Tuksono yang bisa kita kelola dan kembangkan hampir seperti di Lebak dengan mengemas adat tradisi dan budaya," kata Kepala Dinas Paiwisata Kulonprogo Joko Mursito SSn MA di sela-sela kunjungan kerjanya bersama wartawan yang tergabung dalam Paguyuban Wartawan Kulonprogo

(PWK), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Lebak Banten, Jumat (3/3). Menurut Joko, pengembangan wisata Kulonprogo menekankan pada pemberdayaan masyarakat. Ajarannya Soekarno membangun desa menumbuhkan kota-kota itu yang diterapkan. "Karena membangun desa-desa wisata ini destinasi wisata pasti kerangkul. Namun kalau kita bangun destinasi wisatanya belum tentu dapat pemberdayaan.

Destinasi wisata yang sudah ada ini justru dikaitkan dengan paket-paket wisata yang ada di desa wisata. Trennya sekarang orang berwisata lebih banyak memilih paket wisata melalui desa wisata," urainya.

Pemberdayaan Masyarakat

Di Baduy itu, lanjut Joko, full pemberdayaan masyarakat. Ketika ke Baduy mereka (warganya) aktivitas biasa, tetapi tetap jualan souvenir, tenun dan yang menarik meskipun warung berjejer tapi tidak ada yang cerewet dalam menawarkan, sehingga ketika kita melewati rumah-rumahnya tidak terganggu.

"Kita masuk di Baduy dapat gambaran kehidupan masyarakat yang sedemikian rupa dan kita tidak terganggu oleh tawaran-tawaran mereka. Itu yang bisa

kita petik dari Lebak Banten ini," kata Joko.

Terhadap kunker ke Lebak Banten tersebut, disampaikan Kepala Diskominfo Kulonprogo Agung Kurniawan SIP MSi bertujuan melihat dari dekat implementasi kebijakan pariwisata berbasis budaya yang dikembangkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

"Pariwisata berbasis budaya diyakini lebih berkesinambungan dibandingkan dengan pariwisata berbasis destinasi buatan. Kulonprogo bisa belajar banyak dari Lebak Banten, khususnya manajemen pariwisata, pemasaran dan kemasan destinasi sarat dengan nilai lokalitas yang khas," ucap Agung.

Seperti dikatakan Imam Rismahayadin Kepala Dis-



KR-Widiastuti

Kadinas Kominfo Agung dan Kadispar Joko Mursito, serta Kadisbudpar Lebak Imam bertukar cinderamata.

budpar Lebak Banten, pariwisata di wilayahnya yang ditonjolkan adalah adat budayanya (culture). "Sebab bila kita akan berkompeten

dengan atraksi wisata, kita jelas ketinggalan. Kita baru menggagas wisata atraksi baru 2019," ujarnya sambil menambahkan pihaknya

akan mendorong untuk daya tarik wisatanya seperti Suku Baduy tetap fokus adat budaya.

(Wid/Rul)

Dipeterkeswan Periksa Hewan Masuk Pasar



KR-Endar Widodo

Pencegatan sapi masuk pasar, yang terjangkit LSD langsung disuntik.

WONOSARI (KR) - Dalam mengendalikan penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dipeterkeswan) Gunung-

kidul melakukan pemeriksaan keluar masuknya ternak. Terutama untuk hewan yang akan masuk pasar tidak boleh lolos dari pemeriksaan. Begitu dikes-

etahui terjangkit penyakit kulit LSD langsung dilakukan penyuntikan atau penyemprot. Sampai sekarang jumlah yang terjangkit 220 ekor dan 3 ternak mati. "Untuk ternak yang mati langsung dikubur, daging tidak boleh dimakan," kata Kepala Dipeterkeswan Kabupaten Gunungkidul Wibawanti Wulandari SP, Senin (6/3).

Selain memperketat pemeriksaan hewan masuk pasar, pos-pos penjagaan di perbatasan disiagakan. Sudah tentu sosialisasi kepada para peternak lewat petugas pusat kesehatan hewan (puskesmas) juga digalakkan. Agar peternak melakukan upaya pencegahan dengan melakukan gerakan kebersihan kandang dan lingkungan. (Ewi)

BUPATI H SUNARYANTA Lakukan Penanaman Kopi di Natah

WONOSARI (KR) - Bupati Gunungkidul H Sunaryanta secara simbolis melakukan penanaman kopi di Kalurahan Natah Kapanewon Nglihar Senin (6/3) kemarin. Menurut Lurah Natah, Nur Wahyudi lahan tanaman kopi tersebut untuk tahap awal yang seluas 5,6 hektare berlokasi di buak simpangan berada di kawasan Embung Batara Stiten.

"Nantinya diharapkan bisa berkembang menjadi kebun buah dengan pendampingan dari UGM, BUMN, dan pengiat perkebunan kopi," katanya.

Untuk tahap awal pihaknya sudah melakukan penyiapan kopi bersama Kelompok Tani Karya Muda. Hampir 90 persen tanam kopi bisa tumbuh bagus.

Tujuannya selain menjadikan lokasi sebagai kebun buah diharapkan pula akan menjadi pendukung desti-



KR-Bambang Purwanto

Bupati Gunungkidul secara simbolis tanam kopi di Natah.

nasi wisata Embung Sriten yang saat ini akses jalan yang masih menjadi kendala.

Selain kopi nanti akan ada tanaman buah lainnya seperti alpukat, durian, dan manggis yang saat ini untuk bibit buah saat sudah siap tanam. "Pengelolaan lahan ini nantinya adalah Bumdes dan masyarakat," ujarnya.

Bupati Gunungkidul H Sunaryanta mendukung

program pengembangan perkebunan kopi tersebut. Pihaknya meminta masyarakat untuk melakukan pengelolaan maksimal.

Jika digarap dengan baik bupati optimis perkebunan kopi ini memiliki potensi dan pangsa pasar yang menjanjikan.

Potensi alam di wilayah utara Kabupaten Gunungkidul jika dikelola dan digarap dengan baik memiliki nilai lebih. (Bmp)

OKNUM PEJABAT DITANGKAP ATAS DUGAAN KORUPSI Pemberian Sanksi, Bupati Tunggu Status Hukum

WONOSARI (KR) - Bupati Gunungkidul H Sunaryanta akan terus memantau perkembangan proses hukum Kepolisian Daerah (Polda) DIY terkait dengan penangkapan seorang oknum pejabat Sekretaris Dinas (Sekdin) di jajarannya AS sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi RSUD Wonosari. Saat ditangkap, AS diketahui masih aktif menjabat Sekdin salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gunungkidul. "Kami akan terus ikuti status hukum perkara yang kini ditangani untuk kemudian memberikan sanksi sesuai aturan yang ada," katanya, Senin (6/3).

Karena oknum ASN ini masih menjalani proses hukum maka belum akan langsung menindaklanjuti atas penetapan tersangka maupun prnshanan tingkat penyidikan tersebut. Terutama berkaitan dengan jabatan AS yang ditinggalkan karena tang bersangkutan sedang menjalani proses hukum saat ini.

Bupati H Sunaryanta tidak menutup ke-

ungkinan AS akan dicopot dari jabatannya. Namun keputusan itu perlu dibahas secara internal bersama pihak terkait disesuaikan dengan aturan tentang disiplin ASN. Pihaknya juga mengingatkan agar ASN di wilayahnya untuk memiliki komitmen terhadap agar tidak melakukan pelanggaran hukum.

"Siapa ASN yang melanggar bisa ditindak tegas," ujarnya.

Kepala Badan Kegewawain Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul, Iskandar ketika dihubungi terpisah mengatakan masih menunggu surat resmi dari Polda DIY. Khususnya berkaitan dengan status hukum dari AS.

Menurutnya, AS sebelumnya sudah dijadikan tersangka namun tidak ditahan. Namun jika nantinya memang ditahan, maka AS akan dinonaktifkan sementara dari jabatannya. "Yang bersangkutan akan dihentikan sementara serta mendapat penghasilan 50 persen," ujarnya. (Bmp)

Meningkat, Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak

WATES (KR) - Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Kulonprogo meningkat. Tahun 2021 dan 2022 diantaranya melibatkan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau Panti Asuhan. Hal ini harus menjadi perhatian karena LKSA sebagai pengasuhan anak alternatif tidak boleh lagi ada kekerasan seksual terhadap anak.

Kasus tiga tahun terakhir kekerasan terhadap anak 2020-2022, mungkin memang menurun, 2020 sebanyak 98 kasus, 2021 ada 72 kasus, 2022 ada 62 kasus. Tetapi dari data tersebut, kekerasan seksual terhadap anak makin meningkat. Yakni tahun 2020 sebanyak 56 kasus (57 persen), 2021 ada 42 kasus (58 persen), 2022 sebanyak 43 kasus (69 persen).

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Kulonprogo Drs Y Irianta MSI menyatakan itu pada Deklarasi LKSA tentang Anti Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Sosialisasi Kebijakan PPA, di Aula Adhikarta/Gedung Kaca, Senin (6/3). Deklarasi dilakukan oleh 23 LKSA, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis Pakta Integritas LKSA Ramah Anak.

Irianta berharap dengan adanya deklarasi pada LKSA ini tidak ada lagi pelecehan seksual pada anak baik fisik maupun nonfisik terjadi di lembaga-lembaga masyarakat maupun lembaga-lembaga keagamaan.

Sekda Kulonprogo Triyono mewakili Pj Bupati mengatakan, kekerasan

seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat. Pemkab wajib menyelenggarakan pencegahan tindak Pidana kekerasan seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi.

"Tingginya potensi kerawanan tindak pidana kekerasan seksual pada anak memerlukan langkah antisipatif terhadap tindak pidana kekerasan seksual di semua segmen termasuk terhadap anak di LKSA.

Semoga kekerasan seksual terhadap anak semakin menurun dan bahkan tidak ada lagi, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang tumbuh dalam rasa aman dan bahagia," kata Pj Bupati dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda. (Wid/Rul)

MOU BANK BPD DIY-PEMDA-BI

Percepat Digitalisasi Daerah

WONOSARI (KR) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul bersama PT Bank BPD DIY dan Bank Indonesia (BI) menyelenggarakan *High Level Meeting* Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Hotel Santika, Playen, Senin (6/3). *High Level Meeting* merupakan langkah awal Pemerintah Daerah menyusun program untuk meningkatkan transaksi non tunai (digital) penerimaan daerah. Dalam kesempatan tersebut sebagai implementasinya dilakukan peluncuran salah satu program TP2DD Kabupaten Gunungkidul yaitu ASN Go Digital yang ditandai dengan Penandatanganan Komitmen Bersama yang dilakukan oleh Bupati Gunungkidul H Sunaryanta, Direktur Utama Bank BPD DIY Santoso Rohmad dan

Wakil Ketua DPRD Kab Gunungkidul Wiwik Widyastuti.

"Gunungkidul siap untuk masuk dalam digitalisasi daerah. Bahkan jika nantinya terdapat ASN yang berprestasi dalam transformasi teknologi digital ini, Pemkab akan memberikan penghargaan berupa jabatan," kata Bupati Gunungkidul H Sunaryanta.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Harso Utomo menyampaikan bahwa Penerapan digitalisasi keuangan daerah berdampak positif dalam pendapatan daerah sekaligus pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah. Transaksi QRIS di Gunungkidul meningkat tiga kali lipat pada tahun 2022, sedangkan transaksi digital Pemda meningkat delapan kali, sehingga Pemerintah Kabupaten Gunungkidul



KR-Dedy EW

H Sunaryanta menunjukan penandatanganan komitmen percepatan digitalisasi.

masuk kategori digital. Ke depannya Sinergi dan Inovasi berbagai pihak perlu didorong untuk mendukung akselerasi ETPD. Kegiatan dihadiri oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Saptoyo, Pemimpin Bank BPD DIY Cabang Wonosari Andrianto Agus Susilo, Kepala Dinas, penewu, BUMD dan undangan. Dalam kesempatan ini Dirut BPD DIY Santoso

Rohmad menyerahkan penghargaan transaksi agen BPD DIY terbanyak periode Februari 2023.

Santoso Rohmad mengungkapkan, komitmen ini akan menjadikan transformasi digitalisasi di Gunungkidul semakin meningkat. Tentunya harus dikawal transformasi digital baik di pemda, kapanewon, kalurahan hingga masyarakat. (Ded)

BPJS KETENAGAKERJAAN DIY SALURKAN SANTUNAN JKM

Pj Bupati: Penjahjah Saja Memberi Santunan Sosial

WATES (KR) - Penjabat (Pj) Bupati Kulonprogo Drs Tri Saktiyana mengapresiasi positif optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial atas Manfaat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada masyarakat pekerja sektor petani penderes di Kabupaten Kulonprogo.

Hal tersebut selaras dengan tugas negara, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sudah seharusnya pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakatnya. "Karena pada masa Hindia Belanda saja, penjahjah memberikan jaminan sosial kepada pribumi. *Masak* kita kalah dengan penjahjah," katanya saat penyerahan simbolis kepesertaan dan klaim penerima manfaat BP Jam-sostek bagi penderes di Kulonprogo, di Omah Beji, Kalurahan/Kapanewon



KR-Asrul Sani

Teguh Wiyono (empat kiri) menyerahkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi penderes Kabupaten Kulonprogo kepada Pj Bupati Tri Saktiyana.

Wates, Senin (6/3).

"Tugas kita melindungi rakyat tanpa melihat siapa-pun. Semuanya harus terlindungi terutama warga kita yang dalam masa produktif. Dibandingkan dengan kabupaten kota lain, Kulonprogo angkanya memang tidak besar, tapi kualitas perhatian kita terhadap rakyat kecil jauh lebih besar," tegasnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan DIY, Teguh Wiyono mengatakan, penera-

pan Inpres nomor 2/ 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial di masing-masing kabupaten/kota memang belum sama. Ada yang perhatiannya tinggi, sedang bahkan ada yang masih rendah. "Pada 2022 Kulonprogo pernah meraih penghargaan dari BPJS Kesehatan atas Komitmennya dalam pemenuhan cakupan Universal Health Coverage. Itu menunjukkan perhatian

Kabupaten Kulonprogo terhadap para pekerja maupun memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada masyarakatnya lebih tinggi dari pada kabupaten/kota lain," ungkapnya.

Inpres no 2/2021 memberikan instruksi pemda, provinsi termasuk kabupaten/ kota untuk perhatian terhadap nasib para pekerja yaitu terhadap resiko kematian, hari tua dan pensiun. "Program jaminan sosial meminimalisir risiko akibat kecelakaan kerja atau kematian. Saat butuh biaya untuk merawat kecelakaan bapak ibu tidak perlu mengeluarkan biaya, BPJS sudah menanggung sampai sembuh," tutur Teguh.

Ketua DPRD Akhid Nuryati mengingatkan Pemkab Kulonprogo meningkatkan kepekaannya terhadap kebutuhan masyarakatnya terutama di sektor yang sangat rentan. (Rul)